



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULIANTO HUTAPEA**  
Pangkat, NRP : Prada, 1721107000000100  
Jabatan : Ta Pionir 1 Regu Pioner Pleton Pimu Kima  
Kesatuan : Yonif 644/Wls, Brigif 19/Kh  
Tempat, tanggal lahir : Duri (Riau), 2 Juli 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 644/Wls di Jln. Lintas Utara, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-11/A-11/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024.

### Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/18/XI/2024 tanggal 9 November 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/XI/2024 tanggal 18 November 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/46/PM.I-05/AD/XI/2024 tanggal 20 November 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/46/PM.I-05/AD/XI/2024 tanggal 20 November 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/46/PM.I-05/AD/XI/2024 tanggal 20 November 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/XI/2024 tanggal 18 November 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Hal-hal yang diterangkan para Saksi dalam BAP di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.
- Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada Julianto Hutapea NRP 1721107000000100, Jabatan Ta Pionir 1 Regu Pioner Pleton Pimu Kima, Kesatuan Yonif 644/WIs (Brigif 19/Kh), dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

- Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/568/XI/2024 tanggal 21 November 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak;
- Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/590/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak;
- Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/604/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
- Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/620/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 644/WIs memberikan jawaban sebagai berikut:

- Surat Danyonif 644/WIs Nomor B/1301/XII/2024 tanggal 25 November 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada Julianto Hutapea NRP 1721107000000100 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 25 November 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan;
- Surat Danyonif 644/WIs Nomor B/1332/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada Julianto Hutapea NRP 1721107000000100 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 2 Desember 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Surat Dakwaan 644/WI/2024 Nomor B/1348/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada Julianto Hutapea NRP 1721107000000100 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 16 Desember 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi in absensia Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Yonif 644/WIs (Brigif 19/Kh), Prov Kalbar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mahkamah agung pada 100 tahun tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Julianto Hutapea (Terdakwa) adalah prajurit Yonif 644/WIs Brigif 19/Kh dengan jabatan sebagai Ta Pionir 1 Regu Pioner Pleton Pimu Kima dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 1721107000000100.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB setelah pelaksanaan apel pagi Lettu Inf Tri Brilianto Prabowo (Saksi-1) memerintahkan Terdakwa melaksanakan korve di rumah dinas jabatan Dankima, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminta izin kepada Saksi-1 untuk keluar kesatrian untuk membeli perlengkapan mandi dan Saksi-1 mengizinkan, saat akan keluar Markas Terdakwa bertemu dengan Praka Sirajudin (Saksi-2/piket provos) lalu Terdakwa meminta izin kepada Saksi-2 untuk pergi ke kota Putussibau dengan alasan diperintah Lettu Inf Tri Brilianto (Danki Markas) membeli obat, berhubung Saksi-2 juga sedang kurang enak badan kemudian Saksi-2 menitip kepada Terdakwa untuk membelikan obat demam dan tetes mata.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saat dilakukan apel malam personel Kiban Yonif 644/WIs yang diambil oleh Saksi-1 Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) kemudian Saksi-1 memerintahkan anggota Kiban melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjunginya di sekitar Kota Putussibaii, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kaibar namun Terdakwa tidak diketemukan, setelah itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut Ke Komando Atas (Danyonif 644/WIs) sehingga dalam absensi satuan nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya, sehingga pada tanggal 1 Juni 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Psb untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XN/1-6 Psb sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/VI/2024/ldik tanggal 2 Juni 2024.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-6 Psb, tanggal 2 Juni 2024 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi akibat sering bermain judi online.
7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang yang menjadi perkara ini seluruh wilayah

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer. Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **TRI BRILIANTO PRABOWO**  
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21010131890679  
Jabatan : Bajaupan 1 Ton Morse-81 Kibant Yonif 645/Gty  
Kesatuan : Yonif 644/Wls Brigif 19/Kh  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 20 Juni 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls Jln. Lintas Utara, Putusibau utara, Kab Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2023 saat Saksi ditugaskan sebagai Danton Pimu Yonif 644/Wls dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB setelah pengecekan apel pagi Saksi memerintahkan Terdakwa korve di rumah dinas jabatan Dankima dan selesai sekira pukul 15.00 WIB, sebelum kembali ke Barak Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk ke luar markas dengan alasan belanja perlengkapan mandi dan lain-lain, kemudian pada pukul 21.00 WIB Saksi mengambil apel malam remaja/bujangan yang berjumlah 93 (Sembilan puluh tiga) Kurang 1 (satu) hadir 92 (Sembilan puluh dua) Keterangan 1 (satu) personel yaitu Terdakwa belum kembali ke Markas, selanjutnya Saksi perintahkan Batih dan beberapa anggota lain untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Putussibau akan tetapi sampai pukul 24.00 WIB

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dapat ditemukan. Terdakwa tidak membawa handphone karena handphone disita oleh Saksi karena berdasarkan laporan senior bujangan di barak Terdakwa ada indikasi bermain judi online. Karena keberadaan Terdakwa tidak ditemukan sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Komando Atas (Danyonif 644/WIs) dan sejak tanggal 27 April 2024 Terdakwa dinyatakan telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan;

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya;

4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kesatrian dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kab. Putussibau, Prov. Kaimantan Tengah, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan telah melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Psb sesuai surat Danyonif 644/WIs Nomor R/159/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan Saksi dimintai keterangan di Subdenpom XII/1-6 Psb tanggal 3 Juni 2024 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi yang disebabkan sering bermain judi online dan tidak bisa menghilangkan kebiasaan sering bermain judi online meskipun sudah berulang kali dinasehati dan diperingatkan oleh Atasan dan para Senior di Kesatuan Yonif 644/WIs;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SIRAJUDIN**  
Pangkat, NRP : Praka, 31130652091094  
Jabatan : Wadan Ru 1 Ton II kipan B Yonif 644/WIs  
Kesatuan : Yonif 644/WIs Brigif 19/Kh  
Tempat, tanggal lahir : Bima, 22 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Yonif 644/Wls Jln. Lintas Utara, Putussibau utara, Kab.  
Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 saat Terdakwa berdinasi di Yonif 644/Wls dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Saksi sedang melaksanakan piket Provost, kemudian sekira pukul 15.35 WIB Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke kota Putussibau dengan alasan diperintah Lettu Inf Tri Brilianto (Danki Markas) membeli obat, berhubung pada saat itu Saksi juga sedang kurang enak badan (demam) Saksi menitip kepada Terdakwa untuk membelikan obat demam dan tetes mata, kemudian Terdakwa pergi ke Kota Putussibau. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa belum juga Kembali ke kesatuan Yonif 644/Wls dan Saksi menanyakan kepada Danbarak Kompi markas apakah sudah kembali atau belum dan ternyata Terdakwa belum ada di barak, sekira pukul 19.00 Wib Saksi melaporkan menanyakan kepada Danki Markas apakah Terdakwa sudah Kembali atau belum dan juga bertanya apakah Danki Markas memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke kota Putussibau membeli obat? kemudian Danki Markas menjawab ada meminta izin tetapi untuk membeli peralatan mandi, sehingga Terdakwa sampai saat ini belum Kembali kesatuan Yonif 644/Wls tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya;
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kesatrian dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kab. Putussibau, Prov. Kalimantan Tengah, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya kesatuan telah melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Psb sesuai surat Danyonif 644/Wls Nomor R/159/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan Saksi dimintai keterangan di Subdenpom XII/1- 6 Psb tanggal 3 Juni 2024 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada Julianto Hutapea NRP 1721107000000100, Jabatan Ta Pionir 1 Regu Pioner Pleton Pimu Kima, Kesatuan Yonif 644/WIs (Brigif 19/Kh), dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas menunjukkan sejak tanggal 27 April 2024 dinyatakan Tanpa Keterangan (TK), tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komadan sejak tanggal 27 April 2024 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif 644/WIs Brigif 19/Kh dengan jabatan sebagai Ta Pionir 1 Regu Pioner Pleton Pimu Kima dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 1721107000000100;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB setelah pelaksanaan apel pagi Saksi-1 memerintahkan Terdakwa melaksanakan korve di rumah dinas jabatan Dankima, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminta izin kepada Saksi-1 untuk keluar kesatrian untuk membeli perlengkapan mandi dan Saksi-1 mengizinkan, saat akan keluar Markas Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 lalu Terdakwa meminta izin kepada Saksi-2 untuk pergi ke kota Putussibau dengan alasan diperintah Lettu Inf Tri Brilianto (Danki Markas) membeli obat, berhubung Saksi-2 juga sedang kurang enak badan kemudian Saksi-2 menitip kepada Terdakwa untuk membelikan obat demam dan tetes mata;
3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB saat dilakukan apel malam personel Kiban

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 44/Wis yang diumumkan oleh Saksi-1 Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) kemudian Saksi-1 memerintahkan anggota Kiban melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi di sekitar Kota Putussibau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kaibar namun Terdakwa tidak diketemukan, setelah itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut Ke Komando Atas (Danyonif 644/WIs) sehingga dalam absensi satuan nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan);

4. Bahwa banar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya;

5. Bahwa banar pada tanggal 1 Juni 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Psb untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-6 Psb sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/VI/2024/Idik tanggal 2 Juni 2024;

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-6 Psb, tanggal 2 Juni 2024 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi akibat sering bermain judi online;

8. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang yang menjadi perkara ini seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif 644/Wls Brigif 19/Kh dengan jabatan sebagai Ta Pionir 1 Regu Pioner Pleton Pimu Kima dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada, NRP 1721107000000100.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang sebagai anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 644/WIs Brigif 19/Kh, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB setelah pelaksanaan apel pagi Saksi-1 memerintahkan Terdakwa melaksanakan korve di rumah dinas jabatan Dankima, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminta izin kepada Saksi-1 untuk keluar kesatrian untuk membeli perlengkapan mandi dan Saksi-1 mengizinkan, saat akan keluar Markas Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 lalu Terdakwa meminta izin kepada Saksi-2 untuk pergi ke kota Putussibau dengan alasan diperintah Lettu Inf Tri Brilianto (Danki Markas) membeli obat, berhubung Saksi-2 juga sedang kurang enak badan kemudian Saksi-2 menitip kepada Terdakwa untuk membelikan obat demam dan tetes mata;
2. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB saat dilakukan apel malam personel Kiban Yonif 644/WIs yang diambil oleh Saksi-1 Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) kemudian Saksi-1 memerintahkan anggota Kiban melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjunginya di sekitar Kota Putussibau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Tengah namun Terdakwa tidak diketemukan, setelah itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut Ke Komando Atas (Danyonif 644/WIs) sehingga dalam absensi satuan nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan);
3. Bahwa banar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya;
4. Bahwa banar pada tanggal 1 Juni 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Psb untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-6 Psb sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/VI/2024/Idik tanggal 2 Juni 2024.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta yaitu bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-6 Psb, tanggal 2 Juni 2024 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 27 Desember 2024 atau selama 245 (dua ratus empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi akibat sering bermain judi online.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab;
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana sebagai berikut:
    - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpangkat Prada dengan Jabatan Ta Pionir 1

Regu Pioner Pleton Pimu Kima, Kesatuan Yonif 644/WIs (Brigif 19/KH);

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut serta melihat Terdakwa merupakan anggota prajurit TNI yang harus menjadi contoh bagi rekannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa, yang justru melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh Prajurit TNI;

3) Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan sebagai berikut:

1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, semestinya Terdakwa wajib menghindari perbuatan tersebut.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan sebagai berikut:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya dan merusak citra TNI dan kesatuan Terdakwa di mata masyarakat; menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI;

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari menunjukan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan karena dapat mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada Julianto Hutapea NRP 1721107000000100, Jabatan Ta Pionir 1 Regu Pionir Pleton Pimu Kima, Kesatuan Yonif 644/Wls (Brigif 19/Kh), dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, oleh karena barang bukti berupa surat tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Julianto Hutapea**, Prada NRP 1721107000000100, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada Julianto Hutapea NRP 1721107000000100, Jabatan Ta Pionir 1 Regu Pionir Pleton Pimu Kima, Kesatuan Yonif 644/Wls (Brigif 19/Kh), dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Surya Saputra, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 21930028680274 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Kum NRP 524514, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 21930028680274

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.  
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085

Hakim Ketua

Cap/ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779